

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Teks:

- A. Gunawan Setiardja, 1990, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta.
- Abdul Kadir Muhammad, 1986, *Hukum Perjanjian*. Alumni: Bandung.
- Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakt, Bandung.
- Ahmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Aminuddin Salle, (dkk), 2010, *Bahan Ajar Hukum Agraria*, AS Publishing, Makassar.
- Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan, 2009, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Ateng Syafrudin, 2000, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung.
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar, 1993, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanannya*, Djambatan, Jakarta.
- Darwin Ginting, 2010, *Hukum Kepemilikan Hak atas Tanah Bidang agribisnis*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Farida Patittingi, 2008, *Ringkasan Disertasi Penguasaan Tanah Pulau-Pulau Kecil (eksistensi dan Prospek Pengaturannya di Indonesia)*, Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar.

- Fauzie Yusuf Hasibuan, 2009, *Peranan Lembaga Anjak Piutang Dalam Ekonomi Indonesia*, Jakarta.
- Ginanjar Kartasasmita, 1997, *Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Prakteknya di Indonesia*, LP3 ES, Jakarta.
- Hasni, 2010, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA, UUPR dan UUPLH*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Indroharto, 1998, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- J. Satrio, 1993, *Hukum Perikatan. Perikatan yang Lahir dari Undang-undang*. Citra Aditya Bhakti : Bandung.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik , 2008, *Hukum Tata Ruang dalam konsep kebijakan otonomi daerah*, Nuansa, Bandung.
- Ninik Wauf, *Kajian Teori Perlindungan hukum*, 18 November 2011.
- Padmo Wahjono dalam Winahyu Erwiningsih, 2011, *Hak Pengelolaan Atas Tanah*, Total Media, Yogyakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1990, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Philipus M. Hadjon dkk, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajahmada University Press, Yogyakarta.
- Rahardjo Adisasmita, 2010, *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2009. *Perencanaan dan Pembangunan Daerah*, Pustaka Karya, Jakarta.
- Rusadi Kantaprawira, 1998, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sri Susyanti Nur, 2010, Bank Tanah “Alternatif Penyelesaian Masalah Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Kota Berkelanjutan” AS Publishing, Makassar.

Suhanan Yoshus, 2010, *Hak atas Tanah Timbul Dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia*, Restu Agung, Jakarta.

Supriadi, 2010, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.

Supriyadi, 2010, *Aspek Hukum Tanah Aset Daerah*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta.

Winahyu Erwiningsih, 2011, *Hak Pengelolaan Atas Tanah*, Total Media, Yogyakarta.

A. Sumber Hukum:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725.
3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2005-2015.

